



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

WACANA KEBIJAKAN DISKON TARIF TOL PADA MUDIK LEBARAN 2025

Mandala Harefa
Analisis Legislatif Ahli Utama
mandhar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu wacana kebijakan yang dimaksud adalah penurunan (diskon) tarif tol bagi masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran tahun ini. Pemerintah bersama badan usaha sedang merumuskan implementasi pemberian stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) berupa diskon tarif tol saat Ramadan dan Lebaran 2025. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) atau HK selaku pengelola mayoritas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). *Executive Vice President* Sekretaris Perusahaan HK, Adjib Al Hakim menjelaskan pihaknya memang tengah melakukan dialog bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengkaji untung rugi penerapan diskon tarif tol tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa besaran diskon tarif tol pada mudik Lebaran 2025 telah dibahas. Namun belum ada keputusan terkait besaran tarif karena belum tercapai kesepakatan diskon tarif tol yang akan diterapkan dalam masa mudik Lebaran 2025. Diharapkan besaran diskon tarif tol pada mudik Lebaran 2025 segera diumumkan bersama-sama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ada tambahan ruas jalan tol yang akan disiapkan sepanjang 58 kilometer, antara lain di Palembang dan Yogyakarta, tepatnya dari ruas Prambanan sampai dekat dengan bandara sekitar 6 kilometer. Artinya dengan adanya tol yang difungsionalkan diharapkan dapat mengurangi kemacetan pada saat ada arus mudik, minimal sebelum H-10.

Pada kesempatan yang sama, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan atensi soal kesiapan infrastruktur dalam memperlancar transportasi jelang Lebaran 2025. Pemerintah akan merampungkan seluruh persiapannya agar masyarakat bisa menjalankan ibadah dan mudik dengan lancar. Kebijakan diskon tarif tol diharapkan memberikan stimulus guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada momen Lebaran 2025. Kebijakan serupa telah dilaksanakan pada perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yakni dengan pemberian diskon tarif tol sebesar 10%. Kementerian PU bersama BUJT pada waktu itu memberlakukan diskon tarif tol untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.

Persoalan diskon tarif tol ini harus dibicarakan bersama pengelola dan para operator jalan yang bukan dikelola oleh BUMN, sebab diskon atau penurunan tersebut akan memotong keuntungan perusahaan. Meskipun demikian, diskon bisa tetap diterapkan minimal bisa diberikan sebesar 10% pada tahun ini, karena merupakan arahan presiden. Bahkan diharapkan diskon di momentum Idulfitri 2025 bisa lebih besar dari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 lalu, terlebih untuk ruas tol yang ramai dimanfaatkan oleh masyarakat pemudik. Diskon diberlakukan di antaranya untuk membantu kelancaran lalu lintas dan meringankan beban biaya perjalanan masyarakat serta mendorong sektor pariwisata.

Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, pengelola jalan tol bersama pemerintah melakukan persiapan arus mudik termasuk jalan-jalan arteri yang merupakan akses alternatif pemudik untuk mencapai tujuan dalam mengurai kemacetan akibat adanya *bottle neck* pada saat keluar jalan tol. Pembahasan dan keputusan penurunan tarif tol tentunya harus didukung oleh para pemangku dan pengelola jalan tol, agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai. Selain sebagai stimulus ekonomi, kebijakan ini akan sangat membantu pergerakan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik bersama keluarga dengan aman dan nyaman.

Atensi DPR

Pemerintah memberikan stimulus guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada momen mudik Lebaran 2025, salah satunya dengan memberikan diskon tarif tol. Komisi V DPR RI akan mendukung wacana kebijakan ini sepenuhnya dalam upaya agar masyarakat mendapatkan keringanan dalam biaya tol saat melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025. Komisi V DPR RI mendorong pemerintah agar segera menerbitkan aturan atau keputusan bersama *stakeholder* dan para pengelola jalan tol dalam upaya meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat dalam perjalanan. Komisi V DPR RI juga perlu memastikan alokasi anggaran dalam menyelesaikan jalan tol fungsional sebagai bagian pendukung jalan tol yang ada dan jalan arteri sebagai alternatif. Untuk itu, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah dan para pengelola jalan tol agar kebijakan diskon tarif tol dapat meringankan beban masyarakat dan menjadi stimulus ekonomi pada mudik Lebaran 2025.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 18 & 19 Februari 2025;
finance.detik.com, 20 Februari 2025;
industri.kontan.co.id, 20 Februari 2025;
ksp.go.id, 17 Februari 2025;
tempo.co, 18 Februari 2025.

Minggu ke-3 Februari
(17 s.d. 23 Februari 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

EDITOR

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making

©PusakaBK2025